



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
(BASARNAS), DAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU)**

---

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 15
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Kamis, 9 Juli 2020
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 13.40 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Membahas mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)
Ketua Rapat	: Ir. Ridwan Bae
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: Fisik 23 Orang dan Virtual 13 Orang (36 Orang) dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 10.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran terkait lainnya pada hari ini adalah untuk Membahas mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR tentang pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR untuk melakukan sosialisasi tentang manfaat program Tapera kepada peserta, pemberi kerja dan masyarakat.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR untuk melakukan pendalaman dan pelaporan terkait dengan keberadaan Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) dan lembaga-lembaga pembiayaan perumahan lainnya yang memanfaatkan dana APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.
3. Terkait dengan dampak pandemi Covid-19, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR untuk mempertimbangkan peningkatan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam mendapatkan rumah layak huni.
4. Komisi V DPR RI akan mengagendakan kembali Rapat dengan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR dan BP TAPERA serta Lembaga terkait lainnya di masa sidang berikutnya.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.40 WIB.

Jakarta, 09 Juli 2020

**DIRJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,**

  
**EKO D. HERIPOERWANTO**

**KETUA RAPAT,**

  
**RIDWAN BAE**